

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPEKO) KOTA MOJOKERTO

Yohanes Y. Subiyantoro

Program Studi/Jurusan Sistem Informasi, STIKOM Surabaya, email:subiyan@stikom.edu

Abstrak : Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BAPPEKO telah banyak dilakukan, namun penelitian yang mengkaji tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja BAPPEKO masih relatif sedikit. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja BAPPEKO di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Populasi penelitian ini adalah seluruh kinerja BAPPEKO yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Unit analisisnya adalah setiap pimpinan dalam hal ini kepala BAPPEKO Kota Mojokerto. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diantar langsung oleh penulis. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis Struktur Ekuasi Model (SEM), terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja BAPPEKO di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan, Kinerja BAPPEKO

Abstract : *Research about the factors that affect the performance of work unit in local Government (BAPPEKO) have been much undertaken, however research about affect performance budgeting to performance of BAPPEKO in local government is not many. The objective of this research is to test empirically and analyse whether performance budgeting or information system of financial management have an effect on performance of BAPPEKO in Government of Mojokerto. The population of this research are all of work units (BAPPEKO) in Government of Mojokerto. The unit analysis. the effect of variable effectiveness and efficiency of the authors used structural equation modeling(SEM). The data collecting is done with a questionnaire which delivered directly by the researcher. Before the hypothesis testing is done, the testing of quality data is undertaken firstly. The result of this research proves whether simultanly or partially that the performance budgeting and information system of financial management have an effect and significant on performance of SKPD in Government of Mojokerto.*

Keywords: *Performance Budgeting, Information System of Financial Management, and Performance of BAPPEKO.*

Kegiatan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan UU.32/2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU.22/1999 dan UU.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah sebagai pengganti UU.25/1999.

Pengelolaan keuangan daerah seyogyanya didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, dimana masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai

perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Ada 3 prinsip *value for money* diterapkan dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna. Efektifitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik.

Permasalahan penganggaran yang selama ini terjadi di setiap daerah, dalam proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan anggaran yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kumpulan RKA SKPD, umumnya perhatian DPRD lebih terfokus pada besarnya anggaran. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sering dikenal sebagai akuntabilitas.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran sedangkan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output*, *Outcome*, *Benefit* dan *Impact*.

Obyek dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto. Dari hasil observasi dan data-data yang diperoleh diketahui bahwa dalam penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hal tersebut menyebabkan masih terjadinya pemborosan anggaran, dimana kegiatan yang dilaksanakan hanya untuk memenuhi target *input* dan *output* saja tanpa melihat *outcomes*nya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto?"

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto

Landasan Teori

Menurut Nafarin (2007) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang direncanakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2004), diantaranya:

1. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan.
4. Untuk merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai
5. hasil yang maksimal.
6. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
7. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan

Anggaran memiliki fungsi yang sama dengan manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini disebabkan anggaran mempunyai fungsi sebagai alat manajemen

dalam melaksanakan fungsinya. Menurut Nafarin (2004) fungsi anggaran diantaranya :

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output*. organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumberdaya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2006).

Anggaran Berbasis Kinerja pada pemerintah daerah pertama sekali digulirkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang berisi panduan untuk membuat anggaran kinerja, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan pelaksanaan anggaran. Regulasi ini kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Menurut Buku Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (2009), prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi :

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*)

Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini program/kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*)

Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (*outcom*)

3. *Money Follow Function, Function Followed by Structure*

Money Follow Function merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku)

Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip *Function Followed by Structure*, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan bahwa struktur

organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban. Tugas dan fungsi suatu organisasi dibagi habis dalam unit-unit kerja yang ada dalam struktur organisasi dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi tugas-fungsi.

Penerapan fungsi yang terakhir ini (prinsip ketiga) berkaitan erat dengan kinerja yang menjadi tolak ukur efektivitas pengalokasian anggaran. Hal ini berdasar argumentasi sebagai berikut :

- a. Efisiensi alokasi anggaran dapat dicapai, karena dapat dihindari *overlapping* tugas/fungsi/kegiatan.
- b. Pencapaian output dan outcomes dapat dilakukan secara optimal, karena kegiatan yang diusulkan masing-masing unit kerja benar-benar merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsinya.

Dalam penelitian ini, pengukuran penganggaran berbasis kinerja (PBK) hanya dibatasi pada aspek evaluasi kinerja yang diukur melalui efektifitas dan efisiensi. Mengingat landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pasal 7 (ayat 1 dan 2) yang menyatakan bahwa :

- (1) Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
- (2) Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

Pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada tercapainya hasil. Dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur efektifitas mengacu pada Buku Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan serta dikembangkan berdasarkan penelitian Safni (2010) serta disesuaikan dengan kondisi yang ada pada Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto.

Indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program dilingkup Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto sesuai dengan visi dan misi.
2. Pelaksanaan program dilingkup Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto telah menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.
3. Pelaksanaan program dilingkup Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Efisiensi yang dimaksud dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Faktor penentu efisiensi adalah :

1. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
3. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
5. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna mencapai sasaran yang dimaksud.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur efisiensi mengacu pada Buku Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan serta dikembangkan berdasarkan penelitian Safni (2010) serta disesuaikan dengan kondisi yang ada pada Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto.

Indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Melalui biaya anggaran saat ini, output yang dicapai adalah 100%.
2. Kegiatan dengan anggaran biaya tetap, output yang dicapai mengalami peningkatan.
3. Kegiatan dengan anggaran biaya turun, output yang dicapai mengalami peningkatan.

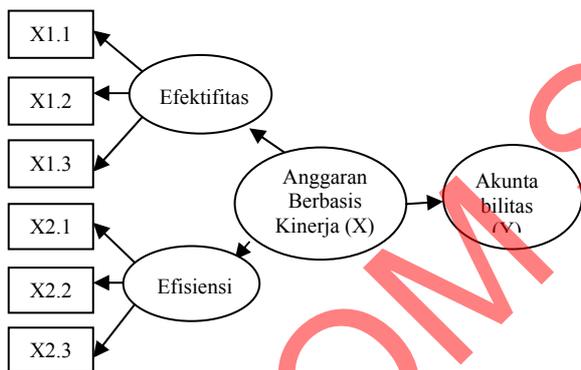
Pengertian akuntabilitas menurut Lawton dan Rose dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris (Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI, 2004:68)

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Akuntabilitas, sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan negara yang baru, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, yang menyangkut :

1. Luas kewenangan dan rentang kendali (*span of control*) organisasi.
2. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable*) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu.

Pengendalian sebagai bagian penting dari masyarakat yang baik saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian pula sebaliknya. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari karyawan organisasi sehingga tercapai kelancaran dan keterpautan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan landasan teori yang diuraikan di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah :



Gambar 1. Model Penelitian

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja (X) pada penelitian ini dibentuk oleh dimensi efektifitas (X_1) dan efisiensi (X_2) dimana masing-masing dimensi memiliki 3 indikator. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas (Y) yang diindikatori oleh 5 aspek yaitu *Input*, *Output*, *Outcome*, *Benefit* dan *Impact*. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan teknik analisis *Structural Equation Modelling*.

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
 "Diduga penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pada Badan

Perencanaan Dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto".

Metode Penelitian

Supomo dan Nur Indiantoro (1999) membagi jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian menjadi tiga yaitu studi eksplorasi, studi deskriptif dan pengujian hipotesis. Berdasarkan penelitian Supomo dan Nur Indiantoro (1999) tersebut maka penelitian ini termasuk jenis pengujian hipotesis. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penjelasan (*eksplanatory research*) karena merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis.

Definisi Operasional Variabel

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pandangan dalam mendefinisikan variabel-variabel yang dianalisis, maka untuk menyatukan pengertian harus dirumuskan definisi operasional variabel. Definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Akuntabilitas (Y)

Akuntabilitas kinerja menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tanggal 15 Juni 1999 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur akuntabilitas mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto. Indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Proses penyusunan dan pelaksanaan program di lingkup Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto telah melibatkan jajaran dibawah kepemimpinan yang sensitif, *responsive* dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan koordinasi antar pihak yang berkepentingan (Y1).
2. Pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program (Y2).
3. Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto dapat melaksanakan kebijakan dengan cara paling efisien dan efektif bagi tujuan organisasi (Y3).
4. Pedoman pengukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program / kegiatan di lingkup

Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto dapat diterima oleh semua pihak (Y4).

5. Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto telah melakukan langkah-langkah untuk mengedukasi masyarakat serta mendapatkan umpan balik dari kegiatan/program sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan (Y5).

b. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X)
Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumberdaya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2006).

Dalam penelitian ini, penerapan anggaran berbasis kinerja terdiri dari 2 dimensi yaitu efektifitas dan efisiensi.

1. Efektifitas (X_1)

Efektifitas yang dimaksud dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur efektifitas mengacu pada Buku Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja serta dikembangkan berdasarkan penelitian Safni (2010) dan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto.

Indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program di lingkup Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto sesuai dengan visi dan misi ($X1.1$).
2. Pelaksanaan program di lingkup Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto telah menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik ($X1.2$).
3. Pelaksanaan prgram di di lingkup Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto mampu meningkatkan partisipasi masyarakat ($X1.3$).

2. Efisiensi (X_2)

Efisiensi yang dimaksud dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur efisiensi mengacu pada Buku Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan serta dikembangkan berdasarkan penelitian Safni (2010) dan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada Badan Perencanaan dan

Pengembangan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto.

Indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Melalui biaya anggaran saat ini, output yang dicapai adalah 100% ($X2.1$)
2. Kegiatan dengan anggaran biaya tetap, output yang dicapai mengalami peningkatan ($X2.2$).
3. Kegiatan dengan anggaran biaya turun, output yang dicapai mengalami peningkatan ($X2.3$).

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk skoring menggunakan skala likert. Dari masing-masing skor jawaban responden tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah pertanyaan atau pernyataan. Selanjutnya untuk mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif agar dapat dengan mudah diukur, ditentukan dengan memberikan nilai untuk indikator-indikator dari variabel dengan kategori yang didasarkan pada skala nilai sebagai berikut :

Tabel 1. Nilai Skala Likert

Jawaban kuesioner	Nilai
Sangat tidak setuju	5
Tidak setuju	4
Netral	3
Setuju	2
Sangat setuju	1

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2003:55). Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto (BAPPEKO) yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang berjumlah 100 orang.

Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2003:55). Jumlah sampel akan ditentukan dengan menggunakan pedoman pengukuran sampel menurut Augusty (2002 : 48):

1. 100-200 sampel untuk teknik maximum Likelihood Estimation.
2. Tergantung pada jumlah parameter yang diestimasi. Pedomannya adalah 5-10 kali jumlah parameter yang diestimasi.
3. Tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh variabel laten. Jumlah sampel adalah jumlah indikator dikali 5-10 bila terdapat 10 indikator, besarnya sampel adalah 100-200.

Mengacu pada pedoman pengukuran sampel menurut (2002 : 48) pada poin pertama yaitu 100-200 sampel untuk teknik maximum Likelihood Estimation maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang yaitu para pegawai dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto (BAPPEKO) yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja sebagaimana terangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Pegawai BAPPEKO Kota Mojokerto

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
Sub bagian umum dan kepegawaian		
1	Kepala Sub Bidang	1
2	Staff	10
Sub bagian penyusunan rencana kerja		
1	Kepala Sub Bidang	1
2	Staff	10
Sub bagian keuangan		
1	Kepala Sub Bidang	1
2	Staff	10
Bidang kesejahteraan Rakyat Dana Aparatur Pemerintahan		
1	Kepala bidang	1
2	Kepala sub bidang kesejahteraan	1
3	Kepala sub bidang aparatur pemerintahan dan kependudukan	1
4	Staff	20
Bidang fisik dan prasarana		
1	Kepala bidang	1
2	Kepala sub bidang lingkungan hidup dan tata ruang wilayah	1
3	Kepala sub bidang perhubungan dan pematusan	1
4	Staff	19
Bidang ekonomi		
1	Kepala bidang	1
2	Kepala sub bidang pertanian, kelautan dan pariwisata	1
3	Kepala sub bidang pengembangan dunia usaha	1
4	Staff	17
Total pegawai		

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto (BAPPEKO) (2011).

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan atau

diperoleh secara langsung dengan menggunakan metode kuesioner dan sumber atau lembaga yang terkait.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang dikumpulkan harus valid untuk digunakan dalam penelitian ini digunakan beberapa metode dalam membantu pengumpulan data yang lengkap sehingga dapat mendukung landasan teori, memudahkan analisa dalam rangka pemecahan masalah. Adapun teknik yang digunakan adalah :

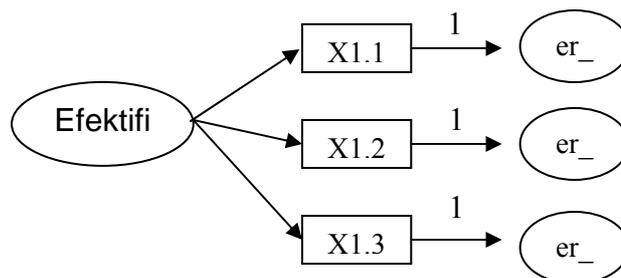
- Wawancara
Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung kepada responden
- Kuesioner
Teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi dengan batas yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang mengisi kuesioner adalah para pegawai dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto (BAPPEKO) yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Teknik Analisis Data

Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling (SEM)*. Model pengukuran variabel efektifitas dan efisiensi menggunakan *Confirmatory factor Analysis*. Analisis faktor konfirmatori adalah salah satu jenis analisis faktor yang ditujukan untuk menguji sebuah teori atau konsep mengenai sebuah proses atau sebuah pengertian atau sebuah fenomena (Ferdinand, 2002 : 126). Penaksiran pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya menggunakan koefisien jalur. Langkah-langkah dalam analisis SEM model dengan contoh faktor penerapan anggaran berbasis kinerja dimensi efektifitas dilakukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} X_{11} &= \lambda_1 \text{ Efektifitas} + er_{11} \\ X_{12} &= \lambda_2 \text{ Efektifitas} + er_{12} \\ X_{13} &= \lambda_3 \text{ Efektifitas} + er_{13} \end{aligned}$$

Bila persamaan diatas dinyatakan dalam sebuah pengukuran model untuk diuji unidimensionalitasnya melalui *confirmatory factor analysis*, maka pengukuran dengan contoh faktor penerapan anggaran berbasis kinerja dimensi efektifitas nampak sebagai berikut :



Gambar 3. Confirmatory Factor Analysis

Keterangan :

- X1.1 = Pernyataan tentang penyusunan program sesuai visi dan misi
 - X1.2 = Pernyataan tentang pelaksanaan program telah menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik
 - X1.3 = Pernyataan tentang pelaksanaan program mampu meningkatkan partisipasi masyarakat
 - er_j = error term X1j
- Demikian juga faktor lain seperti akuntabilitas.

Asumsi Model (*Structural Equation Modelling*)

- a. Uji Normalitas Sebaran dan Linieritas
 - 1). Normalitas dapat diuji dengan melihat gambar histrogram data atau dapat diuji dengan metode-metode statistik.
 - 2). Menggunakan *Critical Ratio* yang diperoleh dengan membagi koefisien sampel dengan standard errornya dan *Skewness value* yang biasanya disajikan dalam statistik deskriptif dimana nilai statistik untuk menguji normalitas itu disebut sebagai *Z-value*. Pada tingkat signifikansi 1%, jika nilai Z lebih besar dari nilai kritis, maka dapat diduga bahwa distribusi data adalah tidak normal.
 - 3). Normal *Probability Plot* (SPSS' 10.1)
 - 4). *Linieritas* dengan mengamati *scatierplots* dari data yaitu dengan memilih pasangan data dan dilihat pola penyebarannya untuk menduga ada tidaknya linieritas.

- b. Evaluasi atas *Outlier*

Outlier adalah observasi atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Hair. et.al., 1995, dikutip oleh Ferdinand, 2002 : 97). Dalam hal ini *Outlier* dapat di evaluasi dengan dua cara yaitu analisis univariate outliers dan analisis multivariate outlier.

- 1). Pada Univariate outliers, sampel besar (diatas 80 observasi) pedoman evaluasi adalah bahwa nilai ambang batas dari Z-score itu berada pada rentang 3 sampai dengan 4 (Hair. et.al., 1995, dikutip oleh Ferdinand, 2002 : 98).
- 2). Evaluasi terhadap *Multivariate outlier* juga perlu dilakukan sebab walaupun data yang dianalisis menunjukkan tidak ada outliers pada tingkat univariat, tetapi observasi-observasi itu dapat menjadi outlier bila sudah saling dikombinasikan. Jarak Mahalanobis untuk tiap-tiap observasi dapat dihitung dan akan menunjukkan jarak sebuah observasi dari rata-rata semua variabel dalam sebuah ruang multidimensional (Hair. et.al., 1995; Norusis, 1994; Tabanick & Fidell, 1996, dikutip oleh Ferdinand, 2002 : 102). Uji terhadap outliers multivariate dilakukan dengan menggunakan kriteria jarak Mahalanobis pada tingkat $p < 0,001$. jarak diuji dengan *Chi-Square* [χ] pada df sebesar jumlah variabel bebasnya.

Ketentuan : bila Mahalanobis > dari nilai χ adalah multivariate outlier.

- c. Deteksi *Multicollinierity* dan *Singularity* untuk melihat apakah terdapat multicollinierity atau Singularity dalam sebuah kombinasi variabel, peneliti perlu mengamati *Determinant matriks covarians*. Dengan ketentuan apabila *determinant sample matriks* mendekati angka 0 [kecil], maka terjadi multikolinieritas dan singularitas (Tabachnick & Fidell, 1998, dikutip oleh Ferdinand, 2002 : 109)
- d. Uji *Validitas dan Realibilitas*

Validitas menyangkut tingkat akurasi yang dicapai oleh sebuah indikator dalam menilai sesuatu atau akuratnya pengukuran atas apa yang seharusnya diukur. Sedangkan realibilitas adalah ukuran, mengenai konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah konstruk yang menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing indicator itu mengindikasikan sebuah konstruk yang umum.

Karena indikator multidimensi, maka uji validitas dari setiap *latent variabel / construct* maka diuji dengan melihat loading faktor dari hubungan antara setiap *observed variable*. Sedangkan reliabilitas diuji dengan *construct reliability* dan *Variance-extractec*. *Construct reliability* dan *Variance-extractec* dihitung dengan rumus berikut :

Construct reliability =

$$\frac{(\sum S \text{ tan dardize Loading})^2}{(\sum S \text{ tan dardize Loading})^2 + \sum E_j}$$
$$\text{Variance Extracted} = \frac{(\sum S \text{ tan dardize Loading}^2)}{(\sum S \text{ tan dardize Loading}^2) + \sum E_j}$$

Sementara ϵJ dapat dihitung dengan formula $\epsilon J = 1 - (\text{Standardize Loading})$ secara umum, nilai *construct reliability* yang dapat diterima adalah > 0,7 dan *variance extracted* > 0,5 (Hair et. Al, 1998). *Standardize Loading* dapat diperoleh dari out put AMOS 4.01, dengan melihat nilai estimasi setiap *construct standardize regression weights* terhadap setiap butir sebagai indikatornya.

Pengujian Hipotesis dan Hubungan Kausal

Pengaruh langsung (koefisien jalur) diamati dari bobot regresi terstandart, dengan pengujian signifikansi pembandingan nilai CR (*Critical Ratio*) atau *p* (probability) yang sama dengan nilai t hitung. Apabila t hitung lebih besar dari pada t tabel berarti signifikan.

Pengujian Model dengan *One Step Approach*

Dalam Model SEM, model pengukuran dan model struktur parameter-parameternya diestimasi secara bersama-sama. Cara ini agak mengalami kesulitan dalam memenuhi fit model. Kemungkinan terbesar disebabkan oleh terjadinya interaksi antara measurement model dan structural model yang diestimasi secara bersama-sama. *One Stop Approach* to SEM digunakan apabila model diyakini landasan teori

yang kuat serta validitas dan realibilitas yang sangat baik.

Tabel 3. *Goodness of Fit Indices*

GOODNESS OF FIT INDEX	KETERANGAN	CUT-OFF VALUE
X^2 - <i>Chi Square</i>	Menguji apakah <i>Covariance</i> populasi yang diestimasi sama dengan <i>covariance sample</i> (apakah model sesuai dengan data)	Diharapkan kecil, 1 s.d 5 atau paling tidak diantara 1 dan 2
<i>Probability</i>	Uji signifikasi terhadap perbedaan <i>matriks covarians</i> data dan <i>matriks covarians</i> yang diestimasi.	Minimum 0,1 atau 0,2 atau $\geq 0,5$.
RMSEA	Mengkompensasi kelemahan <i>Chi-Square</i> pada sample besar.	$\leq 0,08$
GFI	Menghitung proporsi tertimbang varians dalam <i>matriks sampel</i> yang dijelaskan oleh <i>matriks covariance</i> populasi yang diestimasi (analog dengan R^2 dalam regresi berganda)	$\geq 0,90$
AGFI	GFI yang sesuai terhadap DF	$\geq 0,90$
CMID / DF	Kesesuaian antara data dan model.	$\leq 2,00$
TLI	Pembandingan antara model yang diuji terhadap <i>baseline</i> model.	$\geq 0,95$
CFI	Uji kelayakan model yang tidak sensitive terhadap besarnya sampel dan kerumitan model.	$\geq 0,95$

Sumber : Ferdinand (202:61)

Interpretasi Hasil

Melakukan interpretasi terhadap hasil pengukuran konstrak laten dengan berpedoman pada tingkat signifikansi *loading factor* atau koefisien lambda (λ) yang berpatokan pada nilai *probability* (p), dianggap signifikan apabila nilai $p < 0,005$. Selanjutnya menguji model lengkap yang berasal dari seluruh konstruk dan indikator yang signifikan untuk mengkaji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen dengan mengamati koefisien jalur (regresi terstandart), baik arah, besaran, maupun signifikansi. Penilaian signifikansi berpedoman pada nilai *probability* (p), batas signifikansi yang digunakan adalah nilai $p \leq 0,05$.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam akuntansi sektor publik khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan khususnya dalam peningkatan kinerja SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sehingga dapat melakukan perbaikan dan pembenahan dalam penyusunan anggaran maupun pengelolaan keuangan daerah kedepan.
- Bagi akademisi dan peneliti lanjutan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis SEM, diketahui bahwa dilihat dari tingkat probabilitas arah hubungan kausal, maka hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, dapat diterima karena probabilitas kausalnya $0,035 < 0,10$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja melalui penerapan efektifitas dan efisiensi anggaran maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto.
- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkup Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga tidak terjadi pemborosan yang tentunya akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Keefektifan pengelolaan anggaran berbasis kinerja perlu dipertahankan sehingga di masa mendatang dapat terjadi peningkatan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. cara yang dapat ditempuh adalah tetap mengusahakan pencapaian kegiatan sebesar 100%, menyusun dan melaksanakan kegiatan yang mengacu pada visi dan misi organisasi dan lebih melibatkan para pemangku kepentingan serta berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
- Untuk variabel efisiensi agar di tahun mendatang bisa ditingkatkan pengelolaannya dan lebih efisien lagi sehingga akuntabilitas dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto semakin baik dan bisa mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan kepada masyarakat. Diharapkan di masa mendatang tidak ada lagi yang bisa meragukan akuntabilitas dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
- Dalam pelaksanaan pencapaian akuntabilitas yang baik diharapkan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto senantiasa menerapkan pengendalian di setiap aspek karena pengendalian sebagai bagian penting dari masyarakat yang baik, saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian pula sebaliknya.

RUJUKAN

- Bastian, Indra, 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta
- BPKP, 2000, *Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Edisi Kelima)*.
- Ferdinand, Augusty, 2002, *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen*, Penerbit BP Undip, Semarang.
- Harahap, S. S. 2001. *Budgeting Peranggaran Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen* Edisi 1 Cetakan Kedua. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hair, J.F. et. al. 1998, *Multivariate Data Analysis*, Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2006, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol 2. No. 1
- Nafarin, M, 2007, *Penganggaran Perusahaan* Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Rosjidi, 2001, *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah. Kerangka, Standar dan Metode*, Puslitbangwas BPKP.
- Salim, Peter, 1987, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Modern English Press, Edisi Ketiga, Jakarta.
- Tabachnick B.G. and Fidel, L.S., 1996, *Using Multivariate Statistics*, Third Edition, Harper Collins College Publisher, New York.
- Winarno Surakhmad, 1994, *Metode dan Teknik Akuntabilitas*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2004, *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta.

STIKOM SURABAYA